

KAJIAN FISKAL REGIONAL

TRIWULAN III 2020



PENANGGUNG JAWAB : SOFANDI ARIFIN
KETUA TIM : ANDER
EDITOR : SUGENG PRASTOWO, PRAPTI LESTARI
ANGGOTA : AGUS SUJIANA, IHSAN HIDAYAT, SUMARSONO,
SITI WAHYUNI, ERMATITA

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan karunia-Nya penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) *Flash Report* Triwulan III Tahun 2020 Provinsi Lampung dapat diselesaikan tepat waktu.

KFR adalah salah satu kajian yang disusun oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung yang diarahkan untuk memotret kondisi fiskal dan kebijakan fiskal di Provinsi Lampung. Hasil analisis yang tertuang dalam KFR menggambarkan potret fiskal secara ringkas yang dikaitkan dengan indikator makroekonomi pada periode kajian.

Pandemi Covid-19 masih berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Lampung di triwulan III 2020. Perekonomian Lampung masih mencatatkan kontraksi -2,41 persen (y-o-y) meski tidak sedalam kontraksi triwulan II-2020. Sumber utama kontraksi adalah sektor Industri pengolahan dengan kontribusi -1,98 persen. Dibandingkan triwulan sebelumnya, perekonomian juga tumbuh positif 4,15 persen (q-to-q). Seluruh setor tumbuh positif yang berarti stimulus fiskal dari pemerintah mulai dirasakan dampaknya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di triwulan III 2020.

Di tengah perekonomian yang kurang kondusif, jumlah pengangguran di Lampung naik 93,9 ribu orang menjadi 209,6 ribu orang atau 4,67 persen. Sementara jumlah penganggur karena dampak Covid-19 adalah 52,6 ribu orang atau sekitar 25,09 persen dari total pengangguran di Lampung.

Realisasi APBN sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah mencatatkan defisit Rp18,91 triliun pada triwulan III 2020. Penerimaan Negara baru mencapai 41,45 persen dari target sedangkan realisasi belanja telah mencapai 78,45 triliun. Dari sisi APBD, pendapatan terealisasi sebesar Rp19,158 triliun dan belanja sebesar Rp14,964 triliun.

Kajian tematik membahas program pemulihan ekonomi di Provinsi Lampung. Salah satu program unggulan Provinsi Lampung, Kartu Petani Berjaya (KPB) telah resmi diluncurkan. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Lampung, dengan share terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 31,55 persen. Menurut Menteri Pertanian, di masa pandemi ini, hanya sektor pertanian yang tumbuh nyata 16,24 persen disaat sektor lainnya justru menurun.

KPB bertujuan meningkatkan pendapatan petani melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi melalui pemanfaatan

teknologi informasi untuk mendorong program hulu-hilir sektor pertanian. Kartu ini menggunakan media aplikasi yang mendukung aktivitas pertanian digital seperti transaksi pembelian, penjualan, serta pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan secara digital. KPB selain sebagai media alokasi pupuk subsidi, juga terintegrasi dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tani untuk mendukung pencapaian program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Selanjutnya sebagai wujud nyata dukungan terhadap usaha kecil, Pemerintah Provinsi Lampung juga meluncurkan aplikasi Pasar Berjaya dan Ojek Sahabat Wanita (Ojesa). Melalui aplikasi Pasar Berjaya, konsumen dapat berbelanja barang di pasar tradisional tanpa harus datang ke pasar tradisional. Adapun aplikasi Ojesa diperuntukkan bagi penumpang wanita dan anak dengan memberdayakan *driver* wanita.

Akhirnya kami berharap agar kajian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 9 November 2020

Kepala Kantor,



Sofandi Arifin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	iii
Daftar Grafik.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	1
B. Inflasi.....	3
C. Indikator Kesejahteraan.....	4
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	5
A. Pendapatan Negara.....	5
B. Belanja Negara.....	9
C. Manajemen Investasi Pusat	11
D. Prognosis Realisasi APBN.....	11
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	12
A. Pendapatan Daerah.....	13
B. Belanja Daerah.....	15
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020.....	16
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	17
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.....	17
B. Pendapatan Konsolidasian.....	17
C. Belanja Konsolidasian.....	20
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional....	22
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	23
A. Pemprov Terus Dorong Pariwisata guna Pulihkan Perekonomian	24
B. Pemprov Lampung Dorong Desa 1 Koperasi	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional (yoy), 2017-2020	1
Grafik 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional (q-to-q), 2017-2020.....	2
Grafik 1.3.	Inflasi Bulanan Bandar Lampung, Metro, dan Gabungan (m-to-m), Januari-September 2020	3
Grafik 1.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung, 2018 - 2020	4
Grafik 2.1.	Perkembangan Penerimaan Negara Lingkup Provinsi Lampung Triwulan III 2017-2020 (Miliar Rupiah)	5
Grafik 2.2.	Perkembangan PPh Triwulan III 2017 - 2020 (Miliar Rupiah)..	6
Grafik 2.3.	Perkembangan PPN Triwulan III 2017 - 2020 (Miliar Rupiah)..	6
Grafik 2.4.	Perkembangan PPnBM Triwulan III 2017 - 2020 (Miliar Rupiah)	7
Grafik 2.5.	Perkembangan Penerimaan Cukai Triwulan III 2017 - 2020 (Juta Rupiah)	7
Grafik 2.6.	Perkembangan PNBP Triwulan III 2017 - 2020 (Miliar Rupiah)..	7
Grafik 2.7.	Perkembangan PNBP Pendidikan Triwulan III 2017 - 2020 (Miliar Rupiah)	8
Grafik 2.8.	PNBP Pendidikan Triwulan III 2017 - 2020 (Miliar Rupiah)	
Grafik 2.9.	Perkembangan PNBP Kepolisian Triwulan III 2017 – 2020 (Miliar Rupiah)	8
Grafik 2.10.	PNBP Kepolisian Triwulan III 2017 – 2020 (Miliar Rupiah)	9
Grafik 2.11.	Pagu dan Realisasi Belanja Triwulan II 2019 – 2020 (Miliar Rupiah)	9
Grafik 2.12.	Alokasi Pagu dan realisasi TKDD Triwulan III 2020 (Miliar Rupiah)	10
Grafik 2.13.	Pagu dan Realisasi Satker BLU Triwulan III 2020 (Miliar Rupiah)	10
Grafik 3.1.	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Lampung, Triwulan III Tahun 2020	13
Grafik 3.2.	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah per Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Lampung, Triwulan III Tahun 2020	14

Grafik 3.3.	Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Lampung, Triwulan III Tahun 2020	14
Grafik 3.4.	Realisasi Dana Perimbangan per Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Lampung, Triwulan III Tahun 2020	15
Grafik 3.5.	Realisasi Belanja Pegawai, Barang & Jasa dan Modal Lingkup Provinsi Lampung, Triwulan III 2020	16
Grafik 3.6.	Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Lampung, Triwulan III 2020	16
Grafik 4.1.	Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Lampung (Miliar Rupiah), s.d Triwulan III 2020 dan 2019.....	18
Grafik 4.2.	Perbandingan Penerimaan Pusat dan Daerah Terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Lampung (Triliun Rupiah), Triwulan III 2020	18
Grafik 4.3.	Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian Pada Provinsi Lampung (Triliun Rupiah), Triwulan III 2020	20
Grafik 4.4.	Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Lampung Triwulan III 2020	21
Grafik 4.5.	Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Lampung Triwulan III 2019	21

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBD Lampung 2020 ...	1
Tabel	1.2.	Andil dan Tingkat Inflasi (m-to-m) Gabungan Juli-September 2020	3
Tabel	2.1.	Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Lampung s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah),	5
Tabel	2.2.	Realisasi Penyaluran KUR Provinsi Lampung, 30 September 2020	11
Tabel	2.3.	Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Lampung Tahun 2020 (Miliar Rupiah)	11
Tabel	3.1.	Realisasi APBD Lingkup Provinsi Lampung s.d Akhir Triwulan III 2020 dan 2019	12
Tabel	3.2.	Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Lampung, sampai dengan Triwulan IV 2020	16
Tabel	4.1.	Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Lampung (Juta Rupiah), Triwulan III 2020	17
Tabel	4.2.	Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Lampung (Juta Rupiah), Triwulan III 2019 dan 2020	19
Tabel	4.3.	Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Lampung Triwulan III 2020	22
Tabel	5.1.	Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Provinsi Lampung	23

BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Tabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBD Perubahan Lampung 2020

No.	Uraian	Target	Capaian s.d Q3
1	Pertumbuhan Ekonomi	3-3,5%	-2,41%
2	Inflasi	3±1%	-0,22%
3	TPT	4,5-5%	4,67%
4	Pendapatan perkapita juta	43,38-45,54	-
5	Penduduk miskin	12-12,50%	12,34%
6	IPM	70,23	69,57
7	Indeks Gini	0,32	0,327

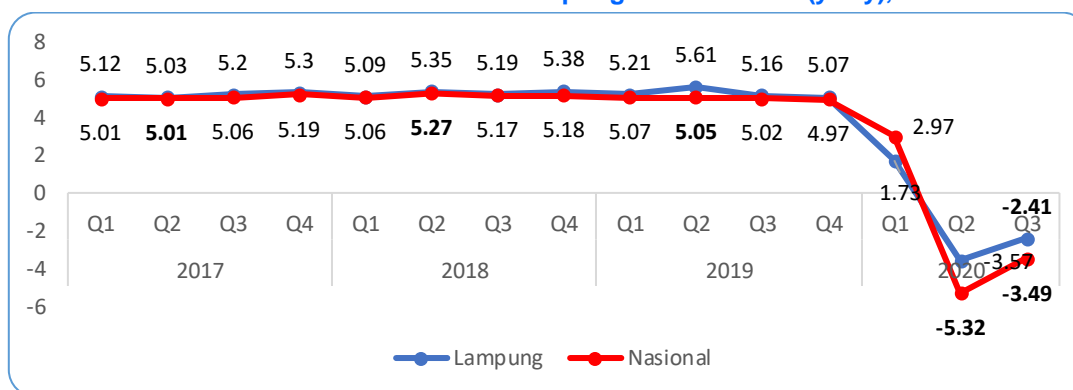
Sumber: humasprotokol.lampungprov.go.id

A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian nasional, termasuk Provinsi Lampung. Banyaknya usaha dan perusahaan yang gulung tikar dan mengurangi kapasitas produksi akibat

turunnya daya beli masyarakat pada gilirannya menurunkan pendapatan masyarakat dan memperlambat perekonomian. Oleh karenanya, dilakukan beberapa perubahan terhadap target makroekonomi untuk menyesuaikan kondisi terkini, diantaranya menurunkan target pertumbuhan ekonomi dari 5,3-5,6 persen menjadi 3-3,5 persen. Penyesuaian juga dilakukan untuk target tingkat Pengangguran dan angka kemiskinan serta indikator lainnya.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional (y-o-y), 2017-2020

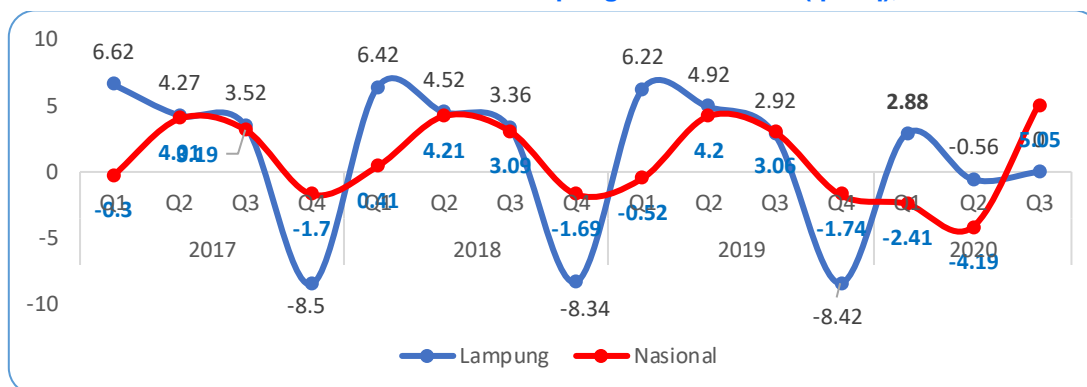


Sumber: BPS Provinsi Lampung

Pada triwulan III-2020 perekonomian Lampung kembali mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar -2,41 persen (y-o-y), lebih dalam daripada rata-rata kontraksi di Sumatera -2,22 persen. Dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan meski kontraksinya tidak sedalam nasional yang terkontraksi -3,49 persen (y-o-y). Perekonomian Provinsi Lampung yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp94,10 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp62,55 triliun.

Dari sisi lapangan usaha, sumber utama kontraksi ekonomi Lampung adalah Industri Pengolahan yang berkontribusi 1,98 persen dan sektor perdagangan sebesar 1,07 persen. Sementara pertumbuhan positif pada sektor pertanian (dengan kontribusi 0,90 persen) dan sektor Informasi dan Komunikasi (dengan kontribusi 0,29 persen) berhasil menahan laju kontraksi tidak terlalu dalam. Sektor jasa kesehatan tercatat tumbuh paling tinggi yaitu 18,19 persen (y-o-y) seiring tingginya permintaan penyediaan *rapid test* massal. Sektor pertanian sebagai motor utama penggerak perekonomian Provinsi Lampung juga tumbuh 3,17 persen karena naiknya hasil produksi subkategori perkebunan pada masa giling padi dan panen raya kopi di Lampung.

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional (q-to-q), 2017-2020



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Dari sisi pengeluaran, sumber utama kontraksi ekonomi Lampung adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,61 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 1,41 persen. PMTB mengalami perlambatan -4,90 persen (y-o-y) disebabkan penurunan reaslisasi belanja modal pemerintah dan penurunan barang modal jenis mesin akibat turunnya impor barang modal dan produksi domestik. Turunnya pendapatan masyarakat akibat aktivitas produksi yang belum normal membuat konsumsi berkontraksi -2,43 persen terutama untuk subkategori bahan makanan, minuman, rokok, dan alkohol; pakaian; transportasi; restoran dan akomodasi

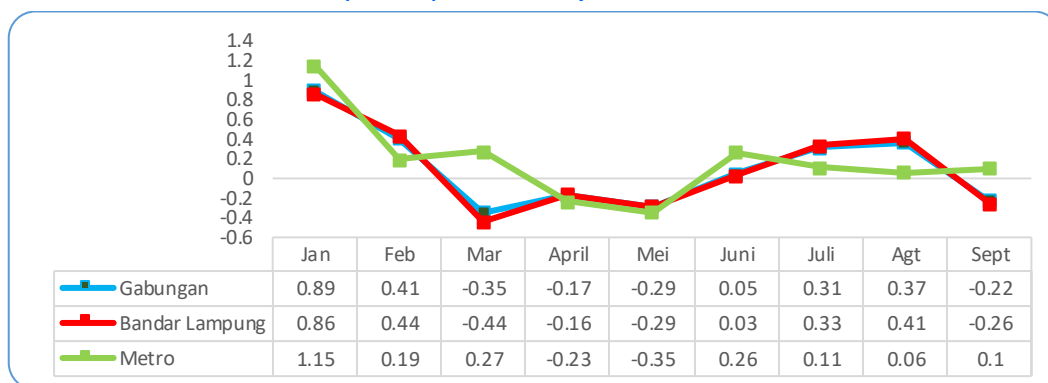
Kondisi perekonomian Lampung pada triwulan III lebih baik dibanding triwulan sebelumnya yang tercermin dari pertumbuhan positif 4,15 persen (q-to-q). Semua sektor tumbuh positif yang mengindikasikan upaya dan stimulus yang diberikan pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi cukup berhasil memperbaiki kondisi perekonomian. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen juga tumbuh positif dengan komponen Konsumsi Pemerintah tumbuh tertinggi 14,51 persen (q-to-q). Sesuai

teori Keynes, peran pemerintah termasuk melalui instrumen belanja pemerintah diharapkan lebih besar ketika terjadi krisis untuk menstimulus pertumbuhan. Hal ini telah dilakukan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

B. INFLASI

Perhitungan inflasi di Provinsi Lampung dilakukan di Bandar Lampung dan Metro. Pada Juli 2020, inflasi gabungan Bandar Lampung dan Metro sebesar 0.31 persen. Inflasi terutama disumbang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan komoditas beras dan telur ayam ras. Kenaikan harga beras dan petai berandil besar pada inflasi Agustus yang tercatat 0,37 persen (m-to-m). Sementara pada September tercatat deflasi sebesar 0,22 persen diantaranya karena harga petai dan telur ayam ras yang mulai turun.

Grafik 1.3 Inflasi Bulanan Bandar Lampung, Metro, dan Gabungan (m-to-m), Januari-September 2020



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Tabel 1.2 Andil dan Tingkat Inflasi (m-to-m) Gabungan Juli-September 2020

Kelompok	Andil Inflasi (m-to-m)		
	Juli	Agt	Sept
Makanan, Minuman, dan Tembakau	0.16	0.00	-0.18
Pakaian dan Alas Kaki	0.00	0.00	0.00
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	0.00	0.00	0.01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	0.03	0.00	0.00
Kesehatan	0.02	0.01	0.00
Transportasi	0.10	-0.05	-0.04
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0.00	0.00	0.00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0.00	0.04	0.00
Pendidikan	0.00	0.13	0.00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0.00	0.19	0.00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0.00	0.05	-0.01
Inflasi Umum	0.31	0.37	-0.22

Sumber: BPS Provinsi Lampung

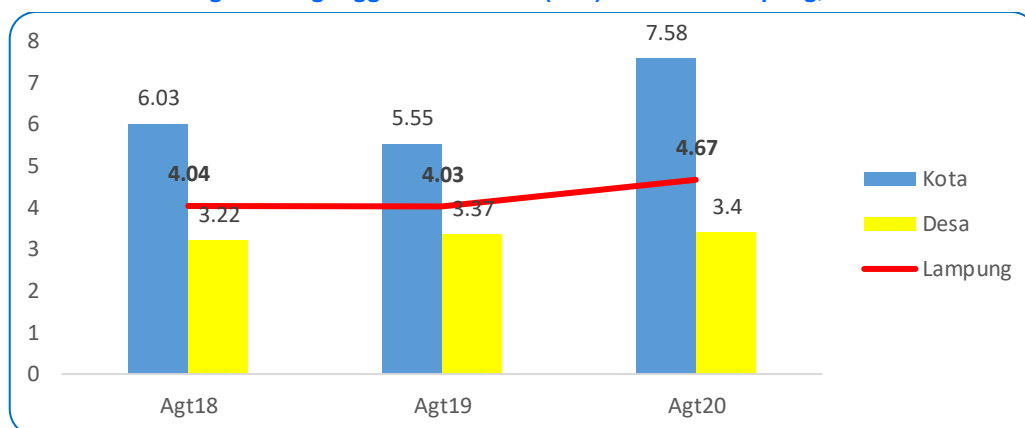
C. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

1. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung pada Agustus 2020 sebanyak 4,49 juta, naik 127,8 ribu orang dibanding Agustus tahun lalu. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga naik 1,10 poin menjadi 70,16 persen. Dalam kondisi pandemi dimana banyak usaha dan perusahaan yang mengurangi jumlah pekerja, pengangguran di Provinsi Lampung naik 93,9 ribu orang menjadi 209,6 ribu orang atau 4,67 persen.

Dilihat dari tempat tinggal, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota lebih tinggi daripada di desa. TPT perkotaan naik 2,04 poin dibanding periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditaatkan, TPT tertinggi diduduki oleh lulusan SMK, yaitu 9,21 persen. Meski turun 0,28 poin dibanding tahun lalu, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi karena dalam beberapa periode terakhir lulusan SMK paling banyak tidak terserap di bursa kerja.

Grafik 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung, 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi tenaga kerja di Lampung. Tercatat 655,9 ribu orang penduduk usia kerja terdampak Covid-19. Jumlah pengangguran karena Covid-19, yaitu mereka yang berhenti bekerja karena Covid-19 diperkotaan sebesar 27,8 ribu orang dan di perdesaan 24,7 ribu orang. Total jumlah penganggur karena dampak Covid-19 adalah 52,6 ribu orang atau sekitar 25,09 persen dari total pengangguran di Lampung. Berkurangnya jam kerja adalah dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja yaitu sebanyak 549,7 ribu orang atau 83,81 persen, terbagi di perkotaan 220,5 ribu orang dan di perdesaan 329,1 ribu orang..

II. PERKEMBANGAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sampai dengan akhir triwulan III tahun 2020 di Provinsi Lampung mencapai Rp23,77 triliun atau 78,45 persen dari pagu Rp30,30 triliun. Sedangkan pendapatan negara sebesar Rp4,86 triliun atau 41,45 persen dari target Rp11,73 triliun. Penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar 86,82 persen sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya 13,18 persen. Sampai dengan akhir triwulan III 2020 tercatat defisit anggaran sebesar Rp18,91 triliun.

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Lampung s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2019 dan 2020 (miliar rupiah)

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	11,603.65	5,927.52	11.731,53	4.863,08
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	11,601.15	5,927.52	11.731,53	4.863,08
1. Penerimaan Pajak	11,023.41	5,266.04	11.023,41	4.222,04
2. PNBP	577.74	661.47	708,12	641,05
II. HIBAH	2.50	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	34,041.32	26,122.95	30.297,68	23.768,28
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	11,329.66	7,424.14	8.966,68	5.893,50
1. Belanja Pegawai	3,525.32	2,667.97	3.625,53	2.674,42
2. Belanja Barang	4,749.46	2,865.17	3.648,17	2.128,30
3. Belanja Modal	3,036.99	1,882.47	1.672,52	1.079,79
4. Belanja Bantuan Sosial	17.88	8.53	20,45	11,00
5. Belanja Lain-Lain	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	22,711.66	18,698.81	21.331,00	17.874,78
1. Transfer Ke Daerah	20,284.55	17.245,43	18.903,26	15.848,16
a. Dana Perimbangan	20,081.37	17,042.25	18.398,14	15.411,50
1) Dana Alokasi Umum	13,361.96	12,251.94	12.234,94	10.239,35
2) Dana Bagi Hasil Pajak	548.95	362.82	562,57	493,42
3) Dana Alokasi Khusus Fisik	2,020.67	644.97	1.559,37	1.451,57
4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4,149.78	3,782.52	4.041,26	3.227,16
b. Dana Insentif Daerah	203.18	203.18	505,12	436,66
2. Dana Desa	2,427.11	1,453.38	2.427,74	2.026,62
Surplus / Defisit	(22,437.67)	(20,195.43)	(18.566,15)	(18.905,19)

Sumber : LKBUN Kanwil DJPb Prov. Lampung dan Omspan (data diolah)

A. Pendapatan Negara

Grafik 2.1 Perkembangan Penerimaan Negara lingkup Provinsi Lampung Triwulan III 2017- 2020 (miliar rupiah)



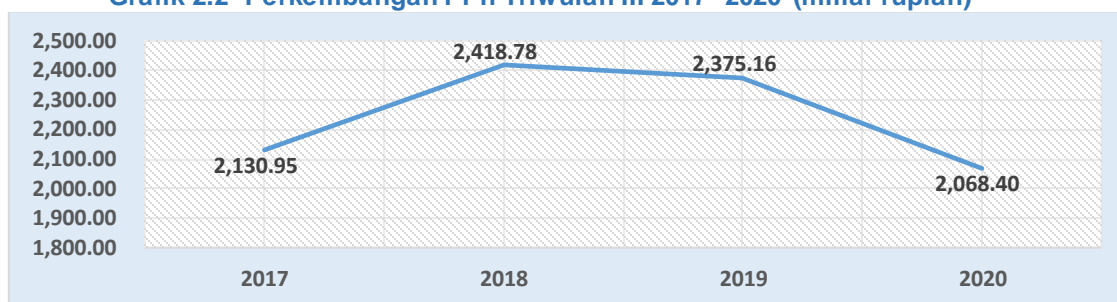
Sumber OMSPAN data diolah

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan sampai dengan triwulan III tahun 2020 baru mencapai Rp4,22 triliun, turun 19,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 dimana penerimaan perpajakan telah mencapai Rp5,27 triliun. Penurunan ini salah satunya dampak dari pandemi Covid-19.

a) Pajak Penghasilan (PPH)

Grafik 2.2 Perkembangan PPh Triwulan III 2017- 2020 (miliar rupiah)

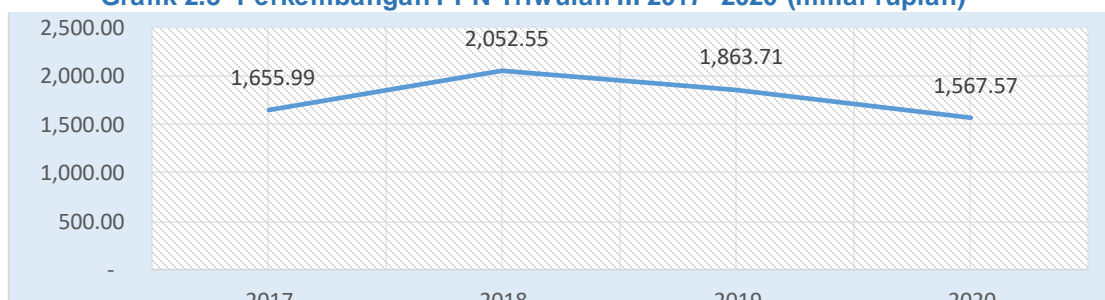


Sumber OMSPAN data diolah

Penerimaan PPh mencapai Rp2,07 triliun, turun 12,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 dan tercatat terendah sejak 2017.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Grafik 2.3 Perkembangan PPN Triwulan III 2017- 2020 (miliar rupiah)



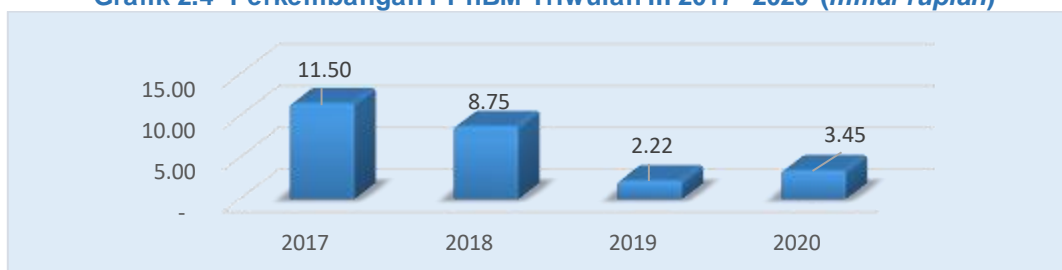
Sumber OMSPAN data diolah

Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sampai Triwulan III 2020 sebesar Rp1,57 triliun, terjadi penurunan 15,89 persen dibandingkan penerimaan PPN

triwulan III 2019 yang telah mencapai Rp1,86 triliun. Hal ini sebagai dampak adanya wabah *virus corona* (Covid-19), dan masih lesunya sektor perdagangan.

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Grafik 2.4 Perkembangan PPnBM Triwulan III 2017- 2020 (miliar rupiah)



Sumber OMSPAN data diolah

PnBM sampai dengan triwulan III 2020 sebesar Rp3,45 miliar, meningkat 55,41 persen dibandingkan triwulan III 2019 yang mencapai Rp2,22 miliar. Namun angka ini lebih rendah dari capaian tahun 2017 dan 2018.

d) Penerimaan Cukai

Penerimaan cukai sampai dengan triwulan III 2020 sebesar Rp231,50 juta meningkat 127,85 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2019. Penerimaan cukai di Provinsi Lampung meliputi penerimaan cukai tembakau, penerimaan administrasi cukai, cukai ethyl alkohol, dan penerimaan cukai lainnya.

Grafik 2.5 Perkembangan Penerimaan Cukai Triwulan III 2017- 2020 (juta rupiah)

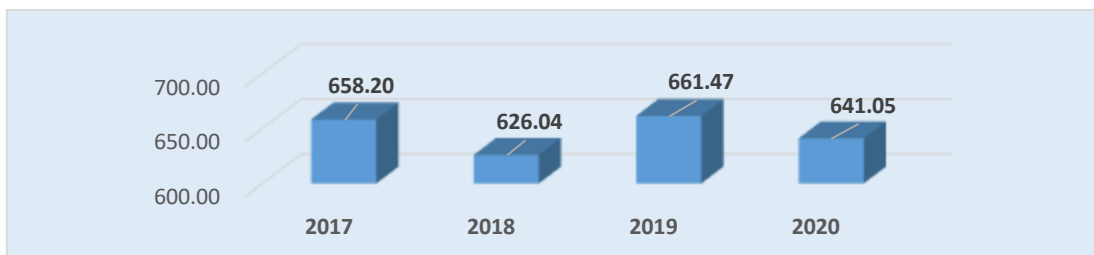


Sumber OMSPAN data diolah

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP sampai dengan triwulan III 2020 telah mencapai 90,53persen atau sebesar Rp641,05 miliar dari target sebesar Rp708,12 miliar, menurun 3,09 persen dibandingkan periode yang sama 2019 dengan PNBP sebesar Rp661,47 miliar.

Grafik 2.6 Perkembangan PNBP Triwulan III 2017- 2020 (miliar rupiah)

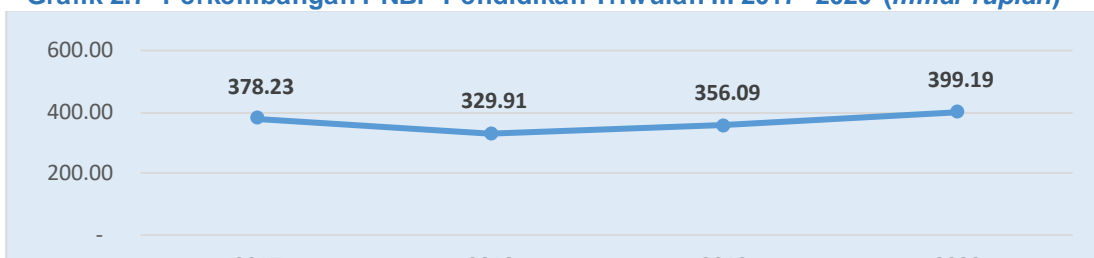


Sumber OMSPAN data diolah

a) Penerimaan PNBPNP Pendidikan

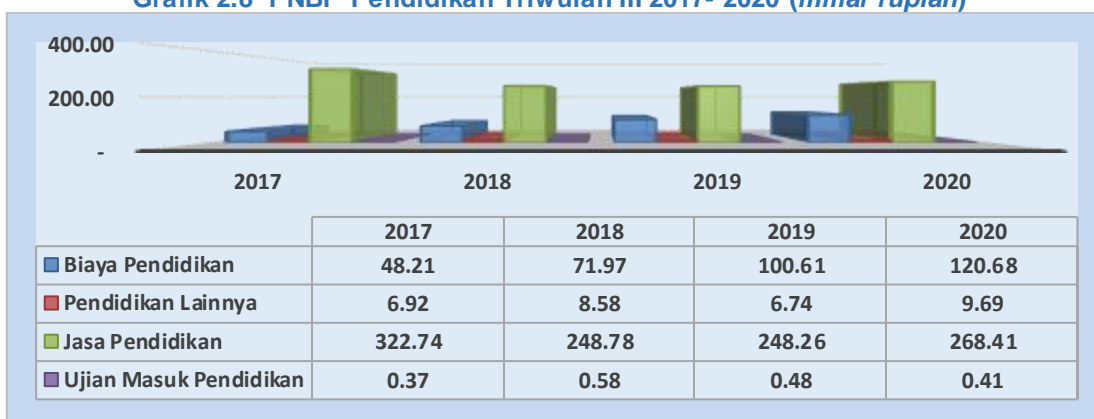
Pendapatan pendidikan memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan PNBPNP di Provinsi Lampung. Sampai dengan triwulan III 2020 penerimaan telah mencapai Rp399,19 miliar, naik 12,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Grafik 2.7 Perkembangan PNBPNP Pendidikan Triwulan III 2017- 2020 (miliar rupiah)



Sumber OMSPAN data diolah

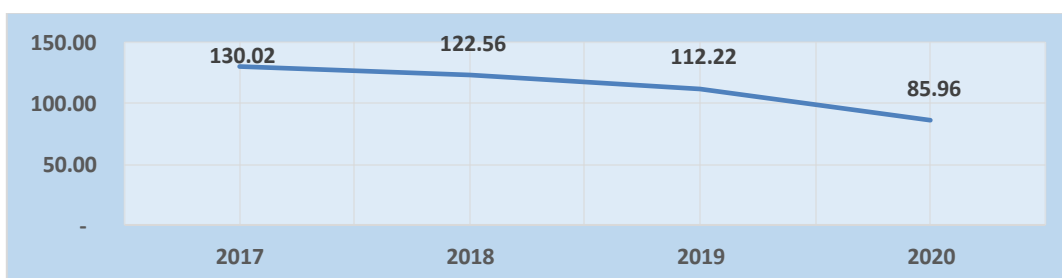
Grafik 2.8 PNBPNP Pendidikan Triwulan III 2017- 2020 (miliar rupiah)



Sumber OMSPAN data diolah

b) Penerimaan PNBPNP Kepolisian

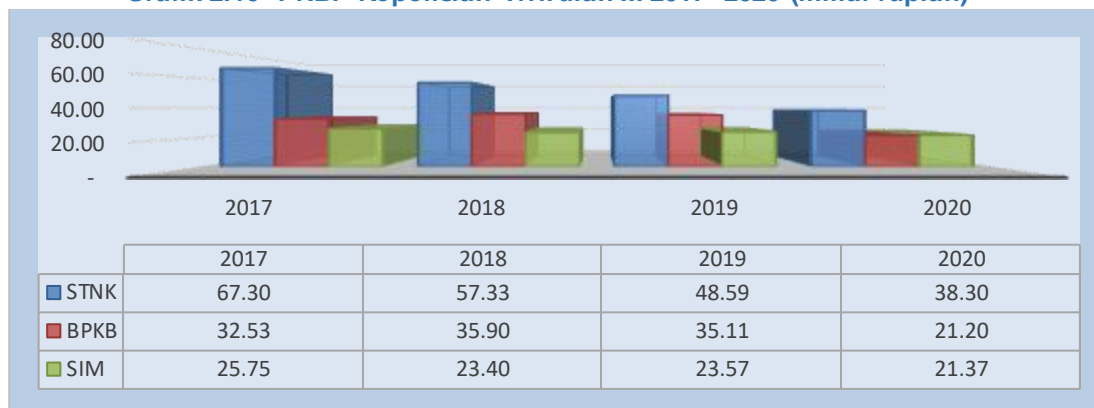
Grafik 2.9 Perkembangan PNBPNP Kepolisian Triwulan III 2017- 2020 (miliar rupiah)



Sumber OMSPAN data diolah

PNBP Kepolisian menempati urutan kedua dengan Rp85,96 miliar, turun 23,40 persen dibandingkan periode yang tahun 2019 mencapai sebesar Rp112,22 miliar.

Grafik 2.10 PNBK Kepolisian Triwulan III 2017- 2020 (miliar rupiah)



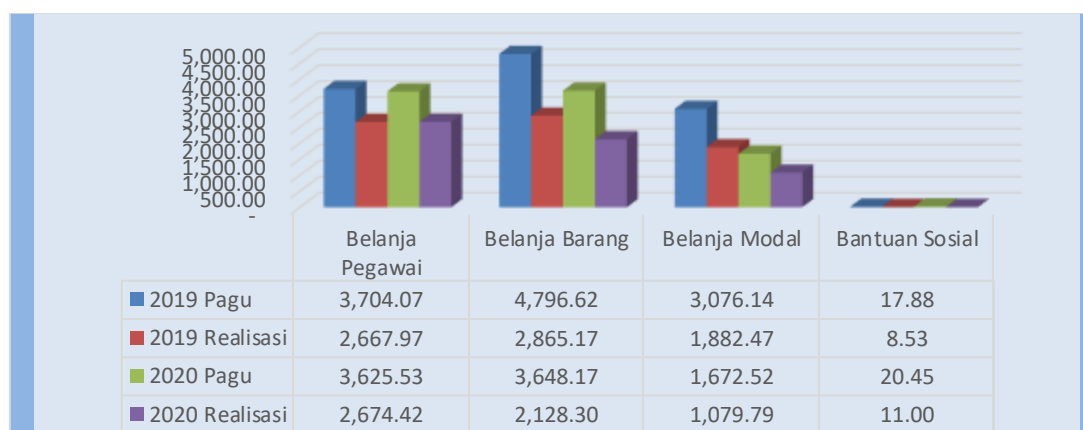
Sumber OMSPAN data diolah

B. Belanja Negara

a. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan triwulan III 2020 mencapai Rp5,90 triliun atau 64,73 persen dari pagu sebesar Rp8,97 triliun. Penyerapan belanja lebih tinggi 1,70 persen dibandingkan triwulan III-2019 (64,03 persen). Realisasi tertinggi belanja pegawai 73,77 persen (Rp2,67 triliun), disusul belanja modal 64,56 persen (Rp1,08 triliun), dan belanja barang 58,34 persen (Rp2,13 triliun), dan terendah belanja bansos 53,77 persen (Rp11,00 miliar).

Grafik 2.11 Pagu dan Realisasi Belanja Triwulan III 2019- 2020 (miliar rupiah)



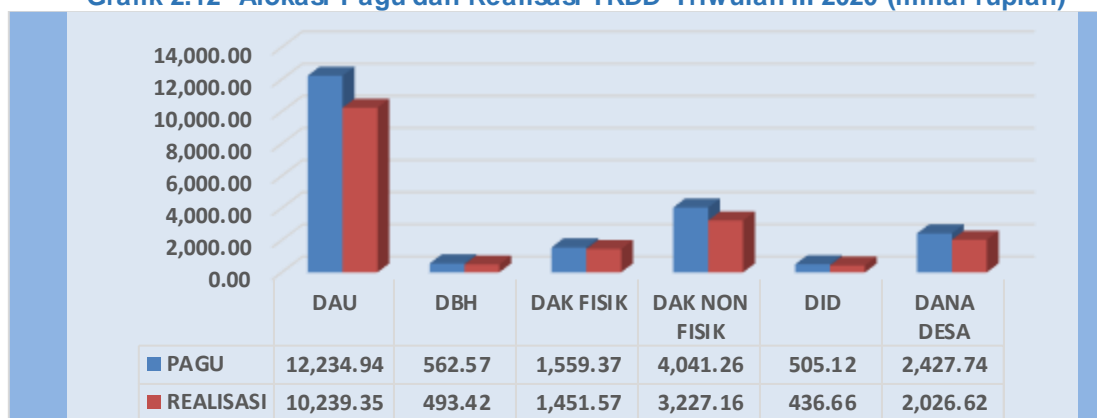
Sumber LKBUN Kanwil DJPb Prov. Lampung dan OMSPAN (data diolah)

b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi sumber utama pendapatan daerah, hal ini terlihat dari pagu APBN 2020 untuk TKDD mencapai

Rp21,33 triliun atau 70,40 persen dari pagu belanja APBN Rp30,30 triliun. Realisasi TKDD sampai dengan triwulan III 2020 telah mencapai Rp17,87 triliun atau 83,80 persen. Persentase realisasi tertinggi yaitu DAK Fisik (93,09 persen), sedangkan realisasi terendah yaitu DAK Non Fisik (79,86persen).

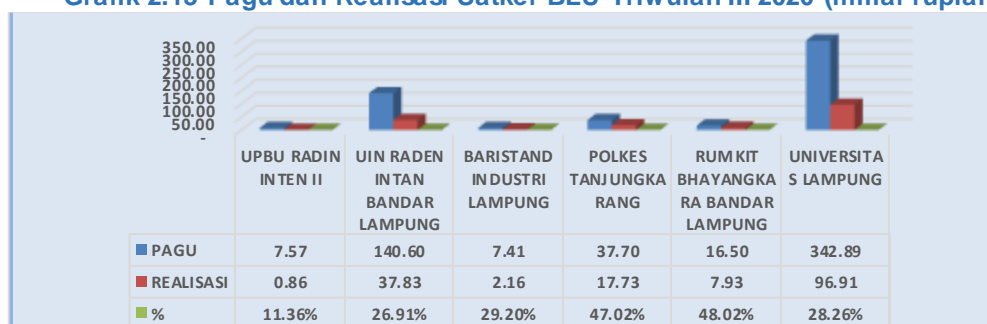
Grafik 2.12 Alokasi Pagu dan Realisasi TKDD Triwulan III 2020 (miliar rupiah)



Sumber OMSPAN data diolah

c. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

Grafik 2.13 Pagu dan Realisasi Satker BLU Triwulan III 2020 (miliar rupiah)



Sumber OMSPAN data diolah

Total alokasi pagu Satker BLU sebesar Rp552,68 miliar dengan realisasi sampai dengan triwulan III 2020 sebesar Rp163,42 miliar atau 29,57 persen. Universitas Lampung memperoleh alokasi pagu tertinggi namun realisasi baru 28,28 persen.

C. Manajemen Investasi Pusat

Tabel 2.2 Realisasi Penyaluran KUR Provinsi Lampung (30 September 2020)

SKEMA KUR	JUMLAH DEBITUR	JUMLAH PENYALURAN
MIKRO	124.777	Rp2.941.043.724.344
TKI	2.150	Rp35.157.393.728
KECIL	4.829	Rp782.497.185.942
UMI	11.585	Rp50.691.893.500
SUPERMI	4.352	Rp39.007.500.000
JUMLAH	147.693	3.848.397.697.514

Sumber SIKP data diolah

D. Prognosis Realisasi APBN

Tabel 2.3 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Lampung Tahun 2020 (miliar rupiah)

Uraian	Pagu Tahun 2020	Realisasi Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2020		Perkiraan Realisasi Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2020	
		Rp	persen	Rp	Persen
PENDAPATAN NEGARA	11.731,53	4.863,08	41,45	8.827,00	75,24
▪ Penerimaan Pajak	11.023,41	4.222,04	38,30	8.033,86	72,88
▪ PNPB	708,12	641,05	90,53	793,14	112,02
BELANJA NEGARA	30.297,68	23.768,28	78,44	29.429,84	97,14
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	8.966,68	5.893,50	65,73	8.401,23	93,69
▪ Belanja Pegawai	3.625,53	2.674,42	73,77	3.538,52	97,60
▪ Belanja Barang	3.648,17	2.128,30	58,34	3.288,09	90,13
▪ Belanja Modal	1.672,52	1.079,79	64,56	1.554,77	92,96
▪ Belanja Bantuan Sosial	20,45	11,00	53,77	19,85	97,08
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	21.331,00	17.874,78	83,80	21.028,61	98,58
1. Transfer Ke Daerah	18.903,26	15.848,16	83,84	18.602,33	98,41
a. Dana Perimbangan	18.398,14	15.411,50	83,77	18.104,94	98,41
1. Dana Alokasi Umum	12.234,94	10.239,35	83,69	12.256,96	100,18
2. Dana Bagi Hasil Pajak	562,57	493,42	87,71	521,00	92,61
3. Dana Alokasi Khusus Fisik	1.559,37	1.451,57	93,09	1.510,41	96,86
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.041,26	3.227,16	79,86	3.816,57	94,44
b. Dana Insentif Daerah	505,12	436,66	86,45	497,39	98,47
2. Dana Desa	2.427,74	2.026,62	83,48	2.426,28	99,94
Defisit/Surplus	(18.566,15)	(18.905,19)		(20.602,84)	

Sumber OMSPAN data diolah

Prognosis realisasi sampai dengan triwulan IV 2020, menggunakan tren realisasi APBN yang terjadi mulai 2012 sampai dengan 2019. Perkiraan pendapatan negara sampai akhir triwulan IV 2020 kemungkinan besar hanya mencapai 75,24%. Pendapatan negara diperkirakan menurun 6,46% di dorong oleh penurunan pendapatan pajak sebagai dampak dari pandemi virus corona atau COVID-19. Dari sisi pengeluaran, belanja negara diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 0,35% didorong oleh belanja negara untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi virus corona atau COVID-19 yang telah melanda mulai bulan Maret 2020. Realisasi belanja negara diperkirakan mencapai 97,14% atau sebesar Rp29,43 triliun dari total alokasi belanja sebesar Rp30,30 triliun, dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 98,58% atau sebesar Rp21,03 triliun dari alokasi pagu Rp21,33 triliun. Sedangkan perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 93,69% atau Rp8,40 triliun dari alokasi pagu belanja sebesar Rp8,97 triliun, dan defisit anggaran sebesar Rp20,60 triliun.

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Realisasi pendapatan APBD sampai dengan triwulan III tahun 2020 adalah Rp19,158 triliun menurun dibanding dengan triwulan III tahun 2019 yang sebesar Rp21,169 triliun. Sedangkan realisasi belanja sampai dengan triwulan III tahun 2020 adalah Rp14,964 triliun, menurun dibanding dengan periode triwulan III tahun 2019. Surplus APBD triwulan III 2020 sebesar Rp4,718 triliun, meningkat bila dibanding dengan triwulan III 2019 yang hanya sebesar Rp3,944 triliun.

Tabel 3.1. Realisasi APBD Lingkup Provinsi Lampung s.d Triwulan III 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2019	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Pendapatan	30,256,078,206,244	19,158,620,387,907	30,811,643,272,495	21,169,732,057,788
PAD	5,523,980,094,085	3,255,360,062,596	5,352,390,627,312	3,292,844,659,628
Pajak daerah	3,648,667,641,725	2,290,067,004,858	3,770,652,911,243	2,573,270,894,702
Retribusi daerah	200,038,471,601	69,602,070,641	139,196,435,076	67,865,567,470
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	129,998,099,462	96,423,695,026	107,847,477,612	89,330,846,836
Lain-lain PAD yang sah	1,545,275,881,298	799,267,292,071	1,334,693,803,381	562,377,350,621
Dana Perimbangan	19,786,997,138,554	13,846,829,322,963	20,239,103,815,629	15,136,482,901,736
DBH	2,016,371,897,997	1,451,332,599,381	1,371,285,462,278	812,791,618,835
DAU	12,066,438,522,000	9,443,711,700,400	12,885,782,178,185	10,654,351,191,000
DAK	5,704,186,718,557	2,951,785,023,182	5,982,036,175,166	3,669,340,091,901
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4,945,100,973,604	2,056,431,002,348	5,220,148,829,554	2,740,404,496,424
Belanja	31,201,667,092,156	14,964,897,676,033	31,888,182,841,401	17,225,289,405,529
Belanja Tidak Langsung	19,338,498,811,641	10,245,991,009,960	18,515,615,046,402	12,151,369,043,886
Belanja Pegawai	11,484,531,544,817	7,547,056,446,818	11,376,930,696,889	7,861,411,420,339
Belanja Bunga	43,614,360,173	15,733,416,282	68,739,264,515	45,870,009,522
Belanja Subsidi	1,000,000,000	1,000,000,000	6,367,407,136	1,926,015,480
Belanja Hibah	2,307,425,802,842	622,339,480,881	1,799,779,103,861	1,185,643,927,049
Belanja Bantuan sosial	55,772,171,010	21,102,884,090	91,029,481,510	35,925,503,971
Belanja Bagi hasil kpd Prov /Kab/dan Pemdes	1,202,458,046,695	677,358,139,878	1,511,121,176,302	956,900,020,927
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov /Kab/dan Pemdes	3,654,197,141,378	1,097,601,697,029	3,456,625,633,755	2,052,278,333,413
Belanja Bantuan Keuangan kpd Partai Politik	995,184,000	995,184,000	170,607,952,773	2,133,669,076
Belanja tidak terduga	588,504,560,726	262,803,760,982	34,414,329,662	9,280,144,109
Belanja Langsung	11,863,168,280,515	4,718,906,666,074	13,372,567,795,000	5,073,920,361,643
Belanja Pegawai	902,823,308,667	463,249,343,523	823,445,596,426	194,986,342,824
Belanja Barang dan jasa	6,506,873,027,232	2,847,776,478,712	6,987,075,169,488	3,172,256,473,961
Belanja Modal	4,453,471,944,616	1,407,880,843,839	5,562,047,029,086	1,706,677,544,858
Surplus/(Defisit)	(945,588,885,913)	4,193,722,711,874	(1,076,539,568,907)	3,944,442,652,260

Sumber : LRA TA 2020 Pemda Lingkup Provinsi Lampung

Realisasi Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang mencapai Rp13,846 triliun (72,27 persen)..

Surplus terutama disumbang oleh realisasi pendapatan yang telah mencapai 63,32 persen, sedangkan realisasi belanja baru mencapai 47,6 persen dari pagu. Disaat yang sama, realisasi belanja modal masih relatif rendah yaitu 31,61 persen sehingga surplus yang terjadi belum mengindikasikan efisiensi operasional pemerintah daerah.

A. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah triwulan III tahun 2020 menurun Rp2,011 triliun dibanding dengan realisasi pendapatan triwulan III tahun 2019.

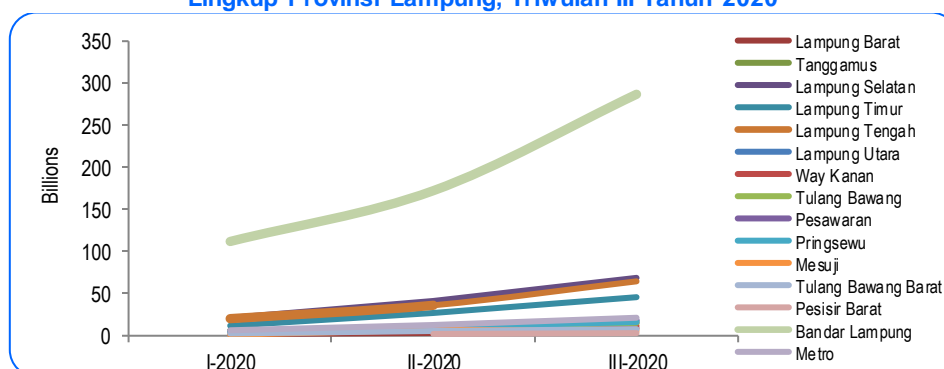
1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD triwulan III tahun 2020 menurun Rp37,484 miliar bila dibanding dengan realisasi triwulan III tahun 2019 karena rendahnya realisasi PAD. Penerimaan PAD triwulan III 2020 menurun 5,48 persen dibanding realisasi triwulan III 2019.

a) Penerimaan Pajak Daerah

Secara agregat, realisasi pajak lingkup Provinsi Lampung baru mencapai 68,24 persen dari target. Untuk itu perlu usaha ekstra meningkatkan realisasi sampai dengan akhir tahun.

Grafik 3.1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Lampung, Triwulan III Tahun 2020



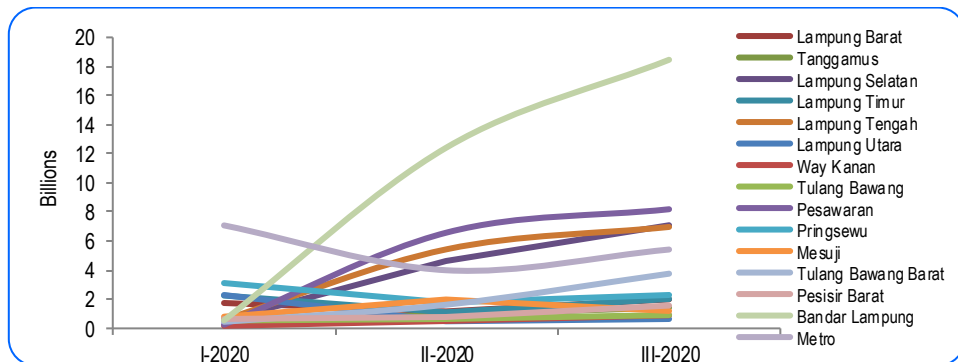
Sumber : LRA TA 2020 Pemda Lingkup Provinsi Lampung

Dari 15 (lima belas) Pemda lingkup Provinsi Lampung, pendapatan pajak daerah tertinggi tercatat di Kota Bandar Lampung. Perolehan pajak daerah Kota Bandar Lampung hingga triwulan III tahun 2020 mencapai Rp286,919 triliun. Terdapat 4 (empat) sektor pajak daerah sebagai penyumbang utama yaitu pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame. Kabupaten Pesisir Barat tercatat sebagai daerah dengan realisasi pajak yang paling rendah (Rp3,125 miliar).

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Sampai dengan triwulan III tahun 2020, realisasi tertinggi retribusi daerah tercatat di Kota Bandar Lampung yang mencapai Rp18,461 miliar. Retribusi tersebut bersumber dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Hal ini terutama karena Kota Bandar Lampung sebagai pusat perekonomian memiliki sumber pendapatan yang lebih banyak dari Kabupaten/Kota lainnya. Adapun realisasi terendah terjadi di Kabupaten Lampung Utara yang sampai dengan triwulan III tahun 2019 baru mencapai Rp702,527 juta.

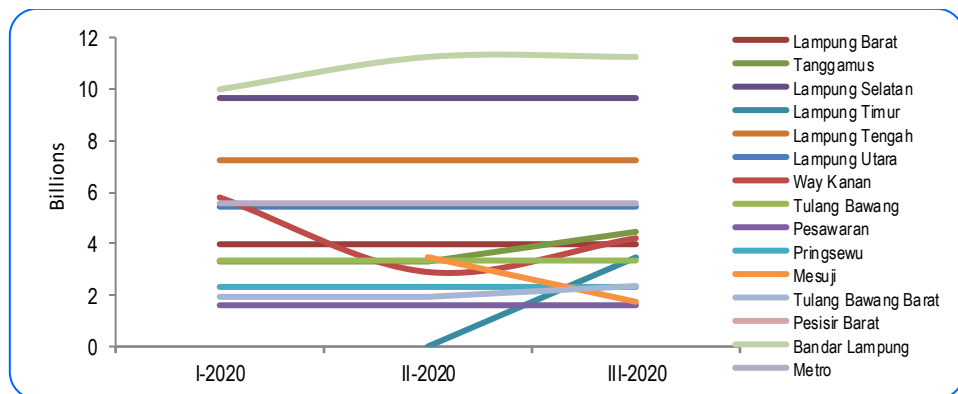
Grafik 3.2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah per Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Lampung, Triwulan III Tahun 2020



Sumber : LRA TA 2020 Pemda Lingkup Provinsi Lampung

c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Grafik 3.3. Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Lampung, Triwulan III Tahun 2020



Sumber : LRA TA 2020 Pemda Lingkup Provinsi Lampung

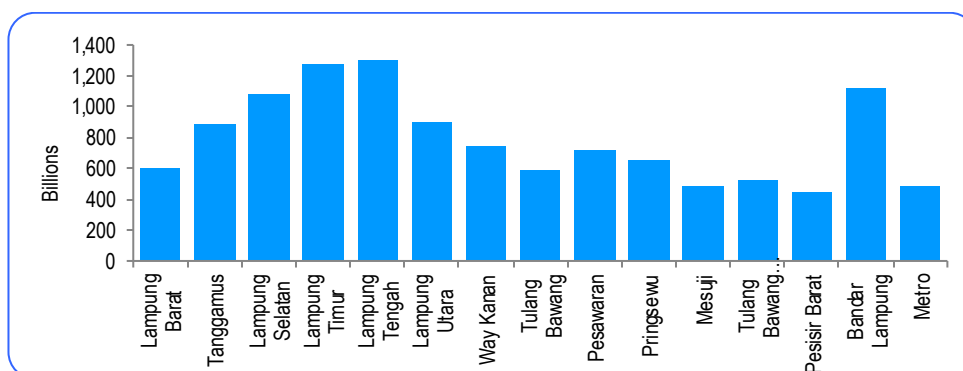
Kota Bandar Lampung mencatat realisasi penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi yaitu Rp11,244 miliar dan terendah adalah Kabupaten Pesawaran sebesar Rp1,602 miliar.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi penerimaan dana perimbangan triwulan III tahun 2020 mencapai Rp13,846 triliun, realisasi ini lebih rendah dibanding triwulan III tahun 2019 yang mencapai Rp15,136 triliun. *Refocusing anggaran* berdampak terhadap

penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sehingga realisasi penerimaan pendapatan pada masing-masing Kabupaten/Kota. Kontribusi dana transfer terhadap pendapatan daerah untuk triwulan III tahun 2020 adalah 72,27 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih sangat tergantung dengan dana transfer dalam mendanai APBD-nya.

Grafik 3.4. Realisasi Dana Perimbangan per Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Lampung, Triwulan III Tahun 2020



Sumber : LRA TA 2020 Pemda Lingkup Provinsi Lampung

Sedangkan realisasi dana per Kabupaten/Kota, Kabupaten Lampung Tengah mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp1,305 triliun dan yang terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp452,951 miliar.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

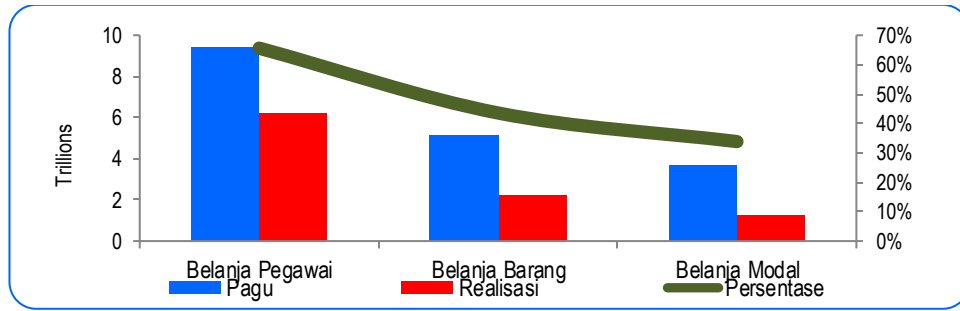
Komposisi Lain-lain Pendapatan Yang Sah dalam APBD lingkup Provinsi Lampung tidak terlalu besar yaitu 10,73 persen dari total pendapatan. Realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2020 adalah Rp2,056 triliun, turun bila dibanding dengan realisasi triwulan III tahun 2019. Sumber utama pendapatan ini berasal dari hibah, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan lain-lain.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Secara agregat, realisasi belanja pegawai mencapai Rp6,190 triliun (65,61 persen), belanja barang Rp2,239 triliun (43,56 persen) dan belanja modal mencapai Rp1,254 triliun (33,83 persen). Belanja masih didominasi untuk belanja operasional. Adapun belanja produktif masih rendah, disebabkan beberapa proyek bahkan baru dimulai pengerjaannya menjelang akhir tahun. Dari 15 (limabelas) Pemda lingkup Provinsi Lampung realisasi belanja tertinggi Kabupaten Lampung Selatan (Rp1,491 triliun) dan terendah di Kabupaten Mesuji (Rp385,223 miliar).

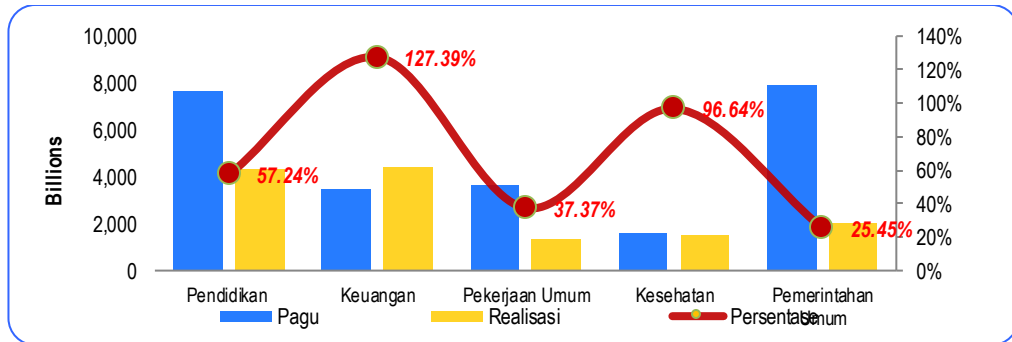
Grafik 3.5. Realisasi Belanja Pegawai, Barang & Jasa dan Modal Lingkup Provinsi Lampung, Triwulan III Tahun 2020



Sumber : LRA TA 2020 Pemda Lingkup Provinsi Lampung

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik 3.6. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Lampung, Triwulan III Tahun 2020



Sumber : LRA TA 2020 Pemda Lingkup Provinsi Lampung

Eksekusi anggaran kesehatan secara cepat dan tepat, diarahkan khususnya untuk pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan dalam penanganan Covid-19.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2020

Tabel 3.2. Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Lampung, sampai dengan Triwulan IV 2020

Uraian	Pagu 2020	Realisasi Triwulan III 2020		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV 2020	
		Rp	%	Rp	%
PENDAPATAN	30,256,078,206,244	19,158,620,387,907	63.32%	27,551,688,196,375	92.64%
PAD	5,523,980,094,085	3,255,360,062,596	58.93%	4,731,564,312,936	85.65%
Dana Perimbangan	19,786,997,138,554	13,846,829,322,963	69.98%	18,457,436,180,057	93.28%
Lain ² Pendapatan Yg Sah	4,945,100,973,604	2,056,431,002,348	41.59%	4,362,687,703,382	88.22%
BELANJA	31,201,667,092,156	14,964,897,676,033	47.96%	25,407,517,513,143	81.43%
Belanja Pegawai	11,484,531,544,817	7,547,056,446,818	65.71%	10,098,120,763,112	87.93%
Belanja Barang	6,506,873,027,232	2,847,776,478,712	43.77%	5,140,317,969,651	79.00%
Belanja Modal	4,453,471,944,616	1,407,880,843,839	31.61%	3,254,873,804,323	73.09%
Belanja Lainnya	8,756,790,575,491	3,162,183,906,664	36.11%	5,748,980,138,273	65.65%
DEFISIT	(945,588,885,913)	4,193,722,711,874		2,144,170,683,232	

Sumber : LRA TA 2012 – 2020 Pemda Wilayah Provinsi Lampung

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS

PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu. LKPK Tingkat Wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung periode triwulan III 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Lampung (Juta Rupiah), Triwulan III 2020

Uraian	2020			2019	
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	4.863.084,66	18.565.573,55	8.118.444,72	-26,64%	11.066.968,39
Pendapatan Perpajakan	4.222.036,91	2.290.067,00	6.512.103,91	-12,54%	7.445.670,28
Pendapatan Bukan Pajak	641.047,75	1.147.075,06	1.606.340,81	-5,95%	1.707.920,61
Hibah		242.075,11	0,00	-100%	334.138,29
Transfer		14.886.356,38	0,00	-100%	1.579.239,20
Belanja Negara	23.677.570,23	14.371.850,84	22.739.207,58	-12,36%	25.945.003,08
Belanja Pemerintah	5.893.500,28	13.188.942,66	19.082.442,93	-11,81%	21.638.093,06
Transfer	17.784.069,95	1.182.908,19	3.656.764,65	-15,10%	4.306.910,02
Surplus(Defisit)	(18.814.485,57)	4.193.722,71	(14.620.762,86)	-1,73%	(14.878.034,69)
Pembiayaan		541.199,91	541.199,91	35,75%	398.686,49
Penerimaan Pembiayaan Daerah		731.743,67	731.743,67	26,67%	577.675,04
Pengeluaran Pembiayaan Daerah		190.543,76	190.543,76	6,46%	178.988,54
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(18.814.485,57)	4.734.922,62	(14.079.562,95)	-2,76	(14.479.348,19)

Sumber: LKPK-TW Kanwil DJPb Provinsi Lampung Triwulan III 2020 (per 26 Oktober 2020)

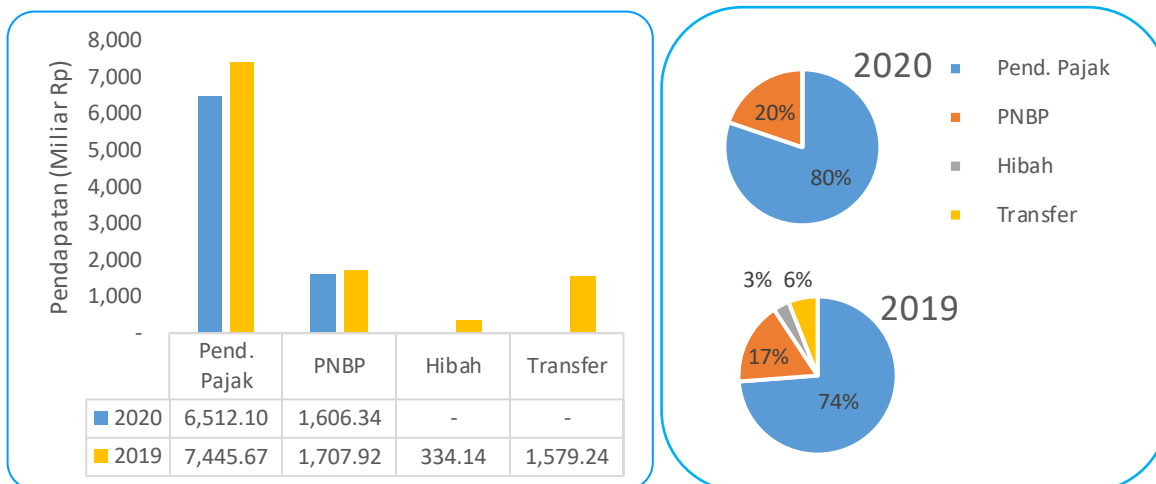
B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Realisasi pendapatan konsolidasian sampai dengan triwulan III 2020 mengalami penurunan sebesar 26,64 persen dibandingkan triwulan III 2019 yaitu sebesar Rp8,118 triliun. Dari jumlah tersebut pendapatan perpajakan mendominasi dengan komposisi mencapai 80 persen atau sebesar Rp6,512 triliun, disusul pendapatan bukan pajak sebesar 20 persen atau sebesar Rp1,606 triliun. Meskipun komposisinya relatif sama dengan tahun sebelumnya, namun secara persentase terjadi peningkatan dimana tahun 2019 pendapatan pajak mencapai

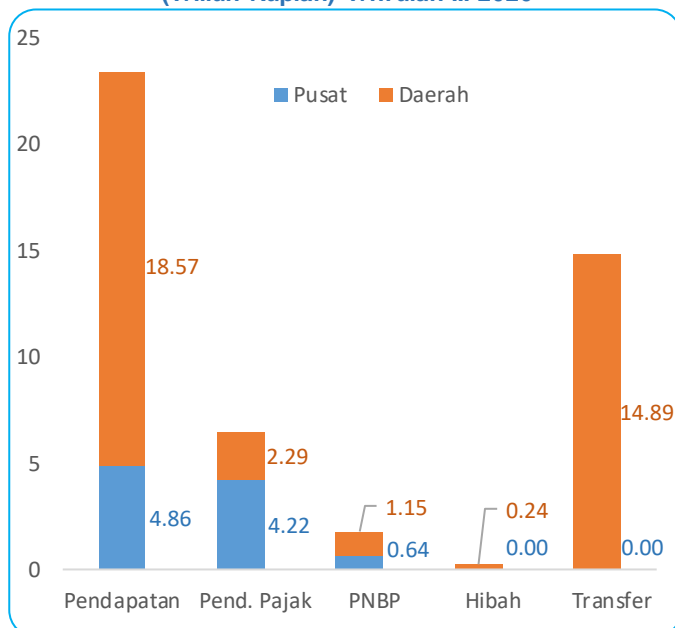
67 persen, dan pendapatan bukan pajak 15 persen dari total pendapatan konsolidasian.

Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Lampung (Miliar Rupiah), s.d Triwulan III 2020 dan 2019



Sumber LKPK Kanwil DJPb Provinsi Lampung TwIII-2019, diolah

Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Pusat dan Daerah terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Lampung (Triliun Rupiah) Triwulan III 2020



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Lampung Triwulan III-2020

Jika diklasifikasikan berdasarkan pendapatan pusat dan daerah, Pendapatan konsolidasian didominasi pendapatan daerah, dengan komposisi terbesar pendapatan di daerah adalah pendapatan transfer dari pusat. Pendapatan perpajakan pusat sampai dengan triwulan III-2020 tercatat lebih tinggi mencapai Rp4,86 triliun atau 64,85 persen sedangkan pendapatan perpajakan daerah hanya Rp2,29 triliun atau 35,18 persen. Namun sebaliknya, pendapatan bukan pajak pemerintah daerah lebih

besar Rp1,15 triliun dibandingkan pendapatan bukan pajak pemerintah pusat hanya sebesar Rp0,64 triliun.

2. Analisis Perubahan

Pendapatan konsolidasian triwulan III 2020 menurun 26,62 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Penurunan ini terjadi pada seluruh

komponen pendapatan, termasuk pendapatan perpajakan. Pendapatan perpajakan turun 12,54 persen dibanding posisi triwulan III 2019. Menurut Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, rendahnya realisasi pendapatan perpajakan di Provinsi Lampung pada triwulan III 2020 diantaranya disebabkan turunnya Pajak Penghasilan (PPH) dikarenakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi regional sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*, dan penurunan penerimaan pajak dari Wajib Pajak sektor ekonomi utama dan komoditas unggulan. Sebagai upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan perpajakan, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung akan menerapkan strategi, yaitu penggalian potensi dari sektor Orang Pribadi prominen sesuai kriteria tertentu, bekerja sama dengan instansi daerah terkait untuk memperkaya data yang dapat digunakan sebagai bahan penggalian potensi dalam meningkatkan penerimaan Provinsi Lampung, penggalian potensi Wajib Pajak 9 komoditas dan sektor Unggulan dan Wajib Pajak pelaku usaha ekspor dan impor, pengawasan potensi penerimaan atas belanja Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Monitoring penyetoran pajak oleh Bendahara Pemerintah, sebagai pemotong dan pemungut pajak. Kebijakan bidang perpajakan di Provinsi Lampung dalam menghadapi pandemi *Covid-19*, yaitu pemberian insentif perpajakan bagi pelaku usaha di sektor tertentu dan kriteria tertentu, dan pelayanan *online* pendaftaran dan konsultasi. Selain memberikan kebijakan sebagaimana tersebut..

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Lampung (Juta Rupiah), Triwulan III 2019 dan 2020

Uraian	2019		2020	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Pendapatan Perpajakan	7.445.670,28	-9,31%	6.512.103,91	-12,54%
PNBP	1.707.920,61	115,37%	1.606.340,81	-5,95%
Total	9.153.590,89	1,7%	8.118.444,72	-26,64%
PDRB/Pertum. Ekonomi	94,70 T	5,16%	94,10 T	-2,41%

Sumber: BPS Lampung dan LKPK-TW Kanwil DJPb Provinsi Lampung

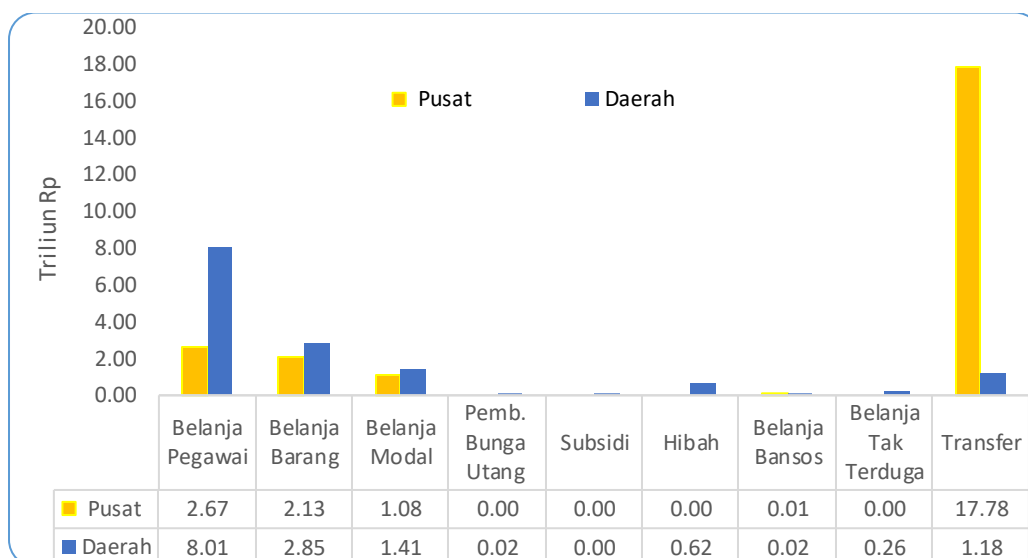
PDRB Provinsi Lampung Triwulan III 2020 terealisasi sebesar Rp94,10 triliun dengan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen menurun dibandingkan dengan Triwulan III 2019. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan total pendapatan konsolidasian yang menurun 26,64 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kontraksi pertumbuhan terjadi pada sebagai

besar lapangan usaha, terutama kegiatan industri pengolahan, jasa lainnya, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontraksi terdalam lebih dari 8 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh sebesar 18,19 persen diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh 6,80 persen. Selain itu, jasa pendidikan juga tumbuh positif sebesar 6,32 persen.

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4.3 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Lampung (Triliun Rupiah), Triwulan III 2020



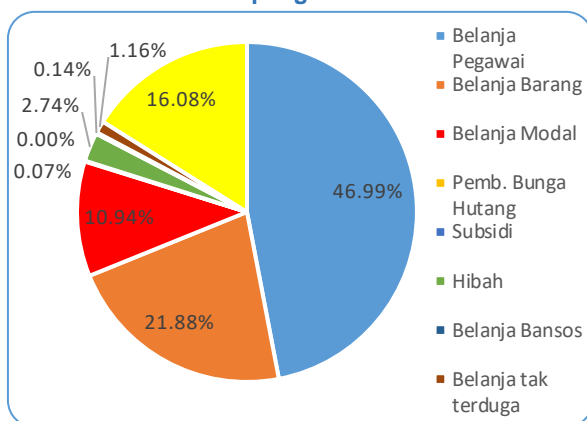
Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Lampung Triwulan III-2020, diolah

Realisasi belanja pemerintah konsolidasian di Provinsi Lampung triwulan III 2020 sebesar Rp19,02 triliun dan transfer telah terealisasi sebesar Rp3,66 triliun. Belanja konsolidasian didominasi oleh belanja operasi yaitu belanja pegawai dengan porsi 46,99 persen atau sebesar Rp10,68 triliun, belanja barang 21,88 persen atau sebesar Rp4,98 triliun dan belanja bunga, subsidi, hibah, Bansos dan belanja tak terduga sekitar 4,11 persen atau sebesar Rp0,93 triliun. Sedangkan realisasi belanja modal porsinya lebih kecil dibanding dengan belanja pegawai dan belanja barang yaitu 10,94 persen atau sebesar Rp2,49 triliun. Hal tersebut sejalan dengan kondisi ekonomi yang mengalami kontraksi. Belanja lebih banyak difokuskan pada jenis program atau kegiatan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian (stimulus ekonomi)

diantaranya untuk meningkatkan konsumsi sebagai upaya memperbaiki perekonomian di Lampung.

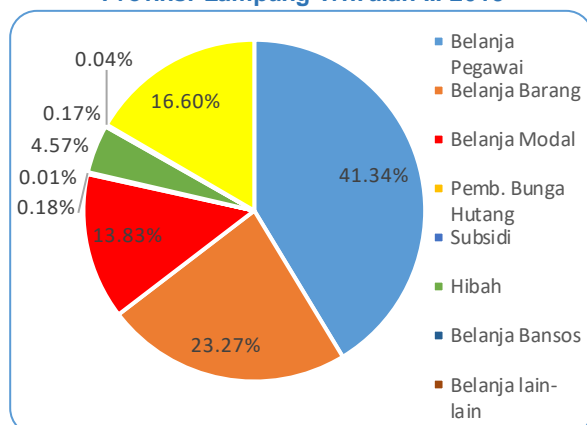
2. Analisis Perubahan

Grafik 4.4 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Lampung Triwulan III 2020



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Lampung Triwulan III 2019



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Lampung

pandemi Covid-19.

Realisasi belanja konsolidasian triwulan III 2020 masih didominasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Namun demikian terjadi penurunan hampir disetiap jenis belanja dibandingkan triwulan III-2019. Belanja tak terduga mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp262,80 milyar namun porsinya tidak signifikan hanya sebesar 1,16% dari total belanja konsolidasian. Kontribusi penurunan setiap jenis belanja dibanding triwulan III 2019, yaitu belanja pegawai menurun 0,37 persen, belanja barang 17,58 persen, dan belanja modal 30,69 persen. Penurunan ini sebagai akibat dari *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan fiskal pemerintah yang tercermin dari besarnya alokasi APBN dan APBD di Provinsi Lampung diharapkan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan kondisi perekonomian. Namun dimasa pandemi Covid-19 diperlukan penanganan di sisi kesehatan serta respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, oleh oleh karena itu pemerintah telah melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program PEN untuk menjaga konsumsi masyarakat di Lampung, telah disalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sampai dengan triwulan III 2020

sebesar Rp2,03 triliun atau 83,48 persen dari pagu, dan telah disalurkan pula program padat karya kementerian/lembaga sebesar Rp425,58 milyar atau 76,72 persen dari pagu. Penyaluran BLT Dana Desa dan padat karya diharapkan dapat menambah konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Lampung.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel 4.3 Laporan Operasional
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2020

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan netto	
Pendapatan	35.031.360.552.874
a. Pajak	6.511.948.051.243
b. Kontribusi sosial	0
c. Hibah	3.053.563.607.820
d. Pendapatan lain	25.465.848.893.811
Beban	23.486.884.721.748
a. Kompensasi pegawai	10.775.961.572.948
b. Penggunaan barang dan jasa	4.360.521.780.859
c. Konsumsi aset tetap	0
d. Bunga	15.733.416.282
e. Subsidi	1.000.000.000
f. Hibah	7.511.900.325.337
g. Manfaat sosial	32.101.334.090
h. Beban lainnya	789.666.292.232
Keseimbangan operasi bruto/neto	11.544.475.831.126
Transaksi Aset Non Keuangan Neto	2.487.668.463.864
a. Aset tetap	2.480.740.404.014
b. Persediaan	0
c. Barang berharga	0
d. Aset nonproduksi	6.928.059.850
Net Lending/Borrowing	9.056.807.367.262
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	
a. Akuisisi Neto Aset Keuangan	8.915.399.729.255
- Domestik	8.915.399.729.255
- Luar Negeri	
b. Keterjadian Kewajiban	-141.407.638.007
- Domestik	-141.407.638.007
- Luar Negeri	

Dana Desa dan Program Padat Karya.

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi Belanja Pemerintah dan Investasi. Dengan total PDRB Lampung sebesar Rp94,10 triliun, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB Lampung triwulan III 2020 adalah 16,84 persen atau sebesar Rp15,17 triliun. Adapun kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB Lampung adalah Rp2,48 triliun atau 2,76 persen. Dalam kondisi perekonomian yang cenderung melambat akibat pandemi *Covid-19*, kontribusi pemerintah dari sisi belanja pemerintah memang sangat dibutuhkan untuk menstimulus perekonomian dalam jangka pendek. Hal ini terbukti dengan kontribusi belanja pemerintah diantaranya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

V. BERITA FISKAL REGIONAL TERPILIH

Covid-19 yang melanda Indonesia telah memberi tekanan berat kepada perekonomian nasional. Banyak pelaku usaha terpaksa menutup gerai karena tak kuat menahan beban operasional yang terus membengkak, yang berdampak pada ancaman karyawan yang kehilangan pekerjaan. Pada kondisi ini, pemerintah berupaya memberikan stimulus untuk mengakselerasi pemulihan perekonomian akibat *Covid-19* melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total dana sebesar Rp695,20 triliun.

Rincian dari total dana tersebut yakni untuk bantuan sosial (bansos) Rp203,9 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.

Semakin cepat proses dan eksekusi program PEN ini, tentu akan sangat baik bagi pulihnya perekonomian nasional. Saat ini, pemerintah terus berusaha mendorong realisasi seluruh program PEN ini, yang ada di masing-masing K/L, terutama permasalahan birokrasi dan administrasi program yang seringkali menjadi hambatan tersendiri.

Tabel 5.1 Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Provinsi Lampung

Program Perlindungan Sosial	Realisasi	Jumlah KPM	Keterangan
PKH	1,728,810,066,000.00	4,173,057	Per 2 Nov 2020
Bantuan Sosial Tunai non Jabodetabek	912,331,800,000.00	2,074,076	Per 2 Nov 2021
Bantuan Pangan Non Tunai	1,510,405,950,000.00	7,864,273	Per 2 Nov 2022
Kartu Prakerja	446,806,550,000.00		Per 2 Nov 2023
BLT Desa	1,772,429,028,900.00		Per 26 Okt 2020
Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM)	246,429,600,000.00	190,470	Per 19 Okt 2020
Bantuan Subsidi Gaji/Upah	181,330,369,634.64		Per 2 Nov 2022
Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR	363,350,553.00		Per 2 Nov 2023
Program Padat Karya Tunai Kementerian Perhubungan	5,003,000,000.00		27,5% dari pagu
Program Padat Karya Tunai Kementerian Pertanian	80,579,884,898.00		75,73% dari pagu
DID Pemulihan Ekonomi	436,658,812,000.00		Per 26 Okt 2020
Subsidi bunga UMKM	37,805,256,780.00		Per 26 Okt 2021
Insentif Nakes	6,201,964,417.00		Per 2 Nov 2023

Sumber: Rekan Spasial Anggaran PEN dan OMSPAN

A. KARTU PETANI BERJAYA DORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Kartu Petani Berjaya (KPB) merupakan salah satu program unggulan Gubernur Lampung. Program ini telah dimulai dan dikembangkan sejak 2019 dan diluncurkan pada Oktober 2020. Dengan kondisi ekonomi yang kurang baik selama masa pandemi Covid-19, KPB tidak hanya didedikasikan untuk memajukan sektor pertanian namun juga ditujukan untuk mendorong program pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Lampung.

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Lampung, dengan share terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 31,55 persen. Beberapa komoditas unggulan Lampung bukan hanya dikonsumsi oleh penduduk di Lampung namun juga didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan nasional seperti padi, jagung, ubi kayu, kopi, dan lainnya. Menurut Menteri Pertanian, di masa pandemi ini, hanya sektor pertanian yang tumbuh nyata 16,24 persen disaat sektor lainnya justru menurun.

Peluncuran KPB diresmikan oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah pada 6 Oktober 2020. Trimurjo dipilih sebagai lokasi launching KPB karena Trimurjo akan menjadi pusat pembenihan yang akan memenuhi kebutuhan benih di Sumatera bagian selatan. Jumlah anggota petani yang tercatat sebagai penetima KPB adalah 18.277 orang.

KPB bertujuan meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong program hulu-hilir sektor pertanian. Kartu itu menggunakan media aplikasi yang mendukung aktivitas pertanian digital seperti transaksi pembelian, penjualan, serta pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan secara digital.

KPB selain sebagai media alokasi pupuk subsidi, juga terintegrasi dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tani untuk mendukung pencapaian program pemulihan ekonomi nasional (PEN). KPB memiliki banyak manfaat bagi petani diantaranya menjadi sarana produksi, akses pembiayaan, penanganan panen dan pasca panen, pemasaran hasil, jaminan sosial, dan jaminan pendidikan pertanian bagi petani yang sukses. Sebagai lokomotif pertanian nasional, pertanian Lampung harus bisa mensejahterakan petani agar pertanian lebih baik, produksi meningkat dan kesejahteraan meningkat. Dengan diluncurkannya KPB diharapkan makin

mempermudah petani dalam mengembangkan usaha pertanian terutama di saat pandemic seperti ini.

Menggandeng BNI, peluncuran KPB dalam mendukung aktivitas pertanian digital untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional di Lampung juga dilakukan di Bandar Lampung. Pada peluncuran KPB tahap pertama itu rencananya diserahkan sebanyak 2 ribu kartu dari target realisasi sebanyak 14 ribu kartu.

B. DUKUNG PROGRAM PEN, LAMPUNG LUNCURKAN APLIKASI PASAR BERJAYA

Hari ulang tahun (HUT) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ke 5 pada 12 Agustus 2020 digelar bersamaan dengan *launching* aplikasi Pasar Berjaya dan Ojek Sahabat Wanita (Ojesa) di Kantor Dinas UMKM Provinsi Lampung yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia. Peluncuran kedua aplikasi ini adalah bentuk nyata dukungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan mempercepat pemulihan ekonomi ditengah pandemi seperti ini.

Salah satu hal yang mendorong terciptanya aplikasi Pasar Berjaya karena di tengah pandemi Covid-19 di Lampung saat ini, masyarakat sangat kesulitan dalam menerapkan protokol kesehatan saat berbelanja di pasar. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat berbelanja dari rumah tanpa harus berinteraksi langsung dengan penjual di pasar. Aplikasi ini juga diharapkan mempermudah dan memperluas pemasaran oleh pedagang di pasar tradisional sehingga dapat terus bertahan dan bertumbuh di masa pandemi.

Saat ini, aplikasi ini baru tersedia di Bandar Lampung. Adapun pasar yang dapat di akses melalui aplikasi ini adalah Pasar Tugu, Pasar Gintung, Pasar Cimeng dan Pasar Urip. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, jika nantinya ada pasar-pasar yang di luar Bandarlampung sudah ada koperasi atau paguyuban dan siap bergabung dengan Pasar Berjaya. maka ini akan meluas. Melalui aplikasi ini nantinya Pemprov Lampung bisa memberikan harga pokok minimal untuk bahan pokok yang dijual di Aplikasi Pasar Berjaya.

Sementara itu, aplikasi Ojesa merupakan aplikasi start up berbasis transportasi *online*. Aplikasi ini memberikan kenyamanan dan perlindungan keamanan bagi penumpang wanita dan anak-anak karena *driver* ojeknya dan penumpangnya adalah wanita.